

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang dilakukan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* menjadikan kepatuhan sukarela wajib pajak (*voluntary compliances*) sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak. Penggalian potensi pajak belum dapat dikatakan optimal sebab jumlah pajak yang terkumpul masih jauh dari yang diharapkan. Angka *tax ratio* Indonesia masih berada di bawah angka *tax ratio* rata-rata baik di tingkat Asia maupun internasional, padahal jumlah penduduk Indonesia sangat besar, namun demikian dari masa ke masa, pajak tetap menjadi primadona penerimaan negara yang tercermin dari fakta kuantitatif sumber penerimaan negara yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak dan *Tax Ratio*

No.	Uraian	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1	Penerimaan Pajak (triliun Rp)	347,0	409,2	491,0	633,8
2	Rasio Pajak terhadap APBN	70,26%	64,32%	69,54%	66,06%
3	<i>Tax Ratio</i>	12,5%	12,3%	12,4%	13,4%

Sumber : Nota Keuangan APBN 2009, Departemen Keuangan

Pada kondisi umum seharusnya kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi beberapa waktu yang lalu setelah krisis moneter tahun 1997-1998 hingga kini berpengaruh positif terhadap dana pajak yang terkumpul (*tax collection*) namun yang terjadi di lapangan tidak demikian. *Tax ratio* Indonesia masih jauh di bawah angka rata-rata internasional yang mencapai sebesar 20 persen, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi beberapa

tahun 2001 dengan asumsi nilai *tax ratio* di masing-masing negara sudah termasuk *local tax*, seperti tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1.2 *Tax Ratio* Beberapa Negara Asia 2001

No.	Negara	Tax Ratio (persen)
1	Indonesia *)	13,2
2	Philipina	13,1
3	Thailand	14,1
4	Malaysia	14,3
5	Siangpore	16,3
6	China	15,9
7	Korea Selatan	26,4
8	Japan	27,1

*) termasuk *local tax* setelah diolah kembali.

Sumber : Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4, Nomor 5, Februari 2005

Paling tidak, ada dua implikasi utama berkaitan dengan rendahnya angka *tax ratio*. Pertama, pada satu sisi mencerminkan rendahnya *tax compliance* masyarakat sehingga jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan masih relatif sedikit dibandingkan dengan basis pajak (*tax base*) yang ada, terlebih masih adanya praktek aparat pajak bersama-sama wajib pajak yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kasus Gayus Tambunan, kasus Bandung, dan kasus Surabaya yang baru-baru ini terungkap menjadi bukti nyata masih adanya perilaku aparat pajak yang tidak baik dan membantu wajib pajak yang memiliki niat buruk terhadap upaya otoritas pajak dalam mengumpulkan dana pajak sehingga terjadi kebocoran dana pajak yang seharusnya terkumpul. Kedua, relatif rendahnya jumlah pajak yang dikumpulkan dibanding dengan basis pajak yang ada juga memberikan harapan untuk peningkatan penerimaan pajak selanjutnya. Dengan kata lain, masih tersedia ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Laporan Hasil Audit Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh BPKP tahun 2000, sebagaimana disitir Nasucha (2003) menunjukkan bahwa selama periode 1995/1996 sampai dengan 1998/1999 terdapat perbedaan (*tax gap*) signifikan antara potensi pajak teoritis dengan realisasi penerimaannya. Lebih

menjelaskan bahwa *tax gap* saat ini berkisar 35-40 persen. Artinya, sekitar 35-40 persen potensi penerimaan pajak belum masuk ke kas negara. Hal ini menjadi indikasi penyebab dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak seringkali menghasilkan surat ketetapan pajak (SKP) yang menyebabkan pajak yang seharusnya terutang lebih tinggi dibandingkan dengan pajak yang telah dibayar atau jumlah rugi yang lebih kecil daripada yang dilaporkan wajib pajak.

Merujuk pada kondisi di atas, beberapa fenomena juga terjadi pada lingkup yang lebih kecil seperti Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur. Indikator administrasi perpajakan yang kurang berhasil dapat dilihat pada tingkat kepatuhan wajib pajak formal dan material dalam pengembalian dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mengembalikan SPT Tahunan

No	Tahun	Jumlah WP Efektif		SPT Masuk		% SPT Masuk		
		Badan	OP	Badan	OP	Badan	OP	Jumlah
1.	2004	43.032	76.571	13.766	24.967	32,0%	32,6%	64,6%
2.	2005	46.468	93.898	14.238	28.037	30,6%	29,9%	60,5%
3.	2006	49.753	100.883	14.434	28.857	29,0%	28,6%	57,6%
4.	2007	52.956	213.959	14.047	64.684	26,5%	30,2%	56,8%
5.	2008	56.562	424.250	15.244	215.640	27,0%	50,8%	77,8%

Sumber : Profil Kanwil DJP Jakarta Timur yang telah diolah kembali

Tabel 1.4 Rencana dan Realisasi Penerimaan Kanwil DJP Jakarta Timur

No.	Uraian	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Rencana (milyar rupiah)	5.939	6.454	7.063	6.953	8.573
2	Realisasi (milyar rupiah)	4.899	5.093	5.454	6.176	8.746
3	Realisasi (persentase)	82,5	78,9	77,2	88,8	102,0

Sumber : Profil Kanwil DJP Jakarta Timur yang telah diolah kembali

beberapa tahun terakhir masih jauh dari yang diharapkan khususnya untuk tahun 2004-2007. Hal ini terjadi karena masih terdapat *tax gap* sedangkan realisasi penerimaan tahun 2008 mengalami surplus sebesar 2,0 persen dari rencana karena adanya tambahan penerimaan pajak dari program *Sunset Policy* seperti yang terlihat pada tabel 1.4 di atas.

Ketimpangan penerimaan pajak pada kurun waktu 2004-2007 di atas didukung dengan data *tax gap* hasil penelitian terhadap 1.600 wajib pajak besar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan 442 wajib pajak KPP Madya di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur untuk tahun pajak 2002 s.d 2007 senilai Rp3.450.912 juta sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.5 *Tax Gap* Potensi Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur
Tahun 2002-2007

No.	Nama KPP	Jumlah Wajib Pajak	<i>Tax Gap</i> (jutaan rupiah)
1	Matraman	200	72.057
2	Jatinegara	200	71.327
3	Pulogadung	200	63.329
4	Cakung Satu	200	79.243
5	Kramatjati	200	152.226
6	Cakung Dua	200	33.791
7	Madya	442	2.880.240
8	Duren Sawit	200	58.648
9	Pasar Rebo	200	40.052
Jumlah		2.042	3.450.912

Sumber : Laporan Evaluasi Penerimaan Pajak 2008 pada Rakorda Kanwil DJP Jakarta Timur

Tax gap juga terlihat dari nilai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) hasil pemeriksaan yang diterbitkan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur selama periode Januari s.d Desember 2009 seperti terlihat pada tabel 1.6 dan tabel 1.7 berikut:

Nilai SKPKB dan STP Hasil Pemeriksaan
Periode Januari s.d Desember 2009

No.	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Hasil Pemeriksaan (Rp)		
		SKPKB	STP	SKPKB + STP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Jakarta Matraman	9,339,557,417	885,568,528	10,225,125,945
2	KPP Pratama Jakarta Jatinegara	6,189,332,845	395,527,296	6,584,860,141
3	KPP Pratama Jakarta Pulogadung	12,772,491,516	543,228,571	13,315,720,087
4	KPP Pratama Jakarta Cakung Satu	15,718,593,507	2,463,854,688	18,182,448,195
5	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	18,827,654,296	1,266,265,347	20,093,919,643
6	KPP Pratama Jakarta Cakung Dua	2,499,064,452	443,248,982	2,942,313,434
7	KPP Madya Timur	180,220,726,201	14,854,134,291	195,074,860,492
8	KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	6,692,356,654	477,680,422	7,170,037,076
9	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo	6,679,664,692	133,534,191	6,813,198,883
	Jumlah	258,939,441,580	21,463,042,316	280,402,483,896

Sumber : Rekapitulasi Laporan Triwulan Hasil Pemeriksaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur

Tabel 1.7 Nilai *Refund Discrepancy* Hasil Pemeriksaan Atas SPT
Lebih Bayar Periode Januari s.d Desember 2009

No.	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Hasil Pemeriksaan (Rp)		
		LB cfm. SPT	LB cfm. SKPLB	<i>Refund Discrepancy</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Jakarta Matraman	(7,932,691,858)	(1,897,199,802)	6,035,492,056
2	KPP Pratama Jakarta Jatinegara	(9,943,773,116)	(5,526,257,479)	4,417,515,637
3	KPP Pratama Jakarta Pulogadung	(10,909,745,933)	(4,411,425,840)	6,498,320,093
4	KPP Pratama Jakarta Cakung Satu	(7,654,862,358)	(5,483,919,653)	2,170,942,705
5	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	(4,860,831,478)	(3,953,223,257)	907,608,221
6	KPP Pratama Jakarta Cakung Dua	(667,685,786)	(346,045,687)	321,640,099
7	KPP Madya Timur	(247,213,474,882)	(211,350,197,434)	35,863,277,448
8	KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	(9,081,426,982)	(8,806,606,778)	274,820,204
9	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo	(2,238,198,690)	(215,489,698)	2,022,708,992
	Jumlah	(300,502,691,083)	(241,990,365,628)	58,512,325,455

Sumber : Rekapitulasi Laporan Triwulan Hasil Pemeriksaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur

kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari besarnya nilai *tax gap*. Sommerfeld et al (1994) dalam Santoso (2008, p. 89) menjelaskan *tax gap* sebagai besarnya penerimaan pajak yang hilang karena adanya ketidakpatuhan yang berbentuk baik penghasilan yang tidak dilaporkan (*underreported income*) maupun pengurang penghasilan yang lebih dilaporkan (*overstated deduction*). Penjelasan Sommerfeld et al ini menyimpulkan bahwa *tax gap* adalah gabungan antara selisih penghasilan yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT dengan penghasilan menurut hasil pemeriksaan (koreksi penghasilan) dan biaya yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT dengan biaya menurut hasil pemeriksaan (koreksi biaya) sehingga kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan koreksi penghasilan dan koreksi biaya. Hal ini timbul karena penghitungan dan pengisian SPT tidak terlepas dari faktor-faktor ekonomi, baik pemilihan metode akuntansi maupun metode lainnya sehingga manajemen perusahaan cenderung untuk memilih metode yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Faktor-faktor ekonomi yang terdapat dalam SPT meliputi jenis usaha, metode penyusutan, komposisi *debt to equity ratio*, profitabilitas usaha, dan tarif pajak (efektif).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor ekonomi dalam SPT yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan sebagai kontributor utama penerimaan pajak pada beberapa KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. Elemen ó elemen SPT Tahunan dijadikan sebagai alat untuk menentukan kepatuhan wajib pajak karena elemen-elemen SPT Tahunan dapat memberikan informasi tentang bagaimana perilaku kepatuhan wajib pajak. Apabila tidak dilakukan maka pihak Kanwil DJP Jakarta Timur akan kesulitan untuk menggali potensi pajak yang pada gilirannya akan mengganggu tugas DJP dalam mengumpulkan dana dari sektor pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan dimuka, dalam penelitian ini, penulis mengajukan rumusan permasalahan melalui pertanyaan:

- a. Bagaimana pengaruh jenis usaha, metode penyusutan, komposisi *debt to equity ratio*, profitabilitas usaha dan tarif efektif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Bagaimana pengaruh jenis usaha, metode penyusutan, komposisi *debt to equity ratio*, profitabilitas usaha, dan tarif efektif secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah seperti tersebut di bawah ini:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jenis usaha, metode penyusutan, komposisi *debt to equity ratio*, profitabilitas usaha dan tarif efektif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jenis usaha, metode penyusutan, komposisi *debt to equity ratio*, profitabilitas usaha, dan tarif efektif secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi yang tertarik untuk mendalami dan melakukan studi di bidang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) mengenai faktor-faktor

g mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, juga dapat memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan terarah mengenai konsep faktor-faktor ekonomi dalam SPT yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan bagi penyempurnaan kebijakan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan wajib pajak yang akan dilakukan penelitian, himbauan, konseling dan pemeriksaan dalam rangka penggalan potensi pajak secara efisien dan efektif di KPP, dengan melakukan analisis risiko tanpa mengurangi kewajiban pengawasan terhadap wajib pajak lainnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan, agar dapat lebih terbuka wawasannya dan lebih mengetahui dengan baik hak dan kewajiban perpajakannya.

1.5 Sistematika Penulisan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan kajian penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, teori-teori yang terkait dengan kepatuhan pajak yang berisi deskripsi secara teoritis tentang faktor-faktor ekonomi dalam SPT yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

1 dari literatur-literatur relevan yang mendasari penelitian, model analisis penelitian, penyusunan hipotesis berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori kepatuhan wajib pajak serta operasionalisasi konsep.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, metode penentuan populasi dan sampel penelitian dan teknik analisis data.

BAB 4 PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis statistik deskriptif, analisis uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang dilakukan dan saran atau rekomendasi yang didapat dari hasil penelitian.